

ARTIKEL RISETURL artikel: <http://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/losari/0602202102>**Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo****Irfan¹, Mahludin H. Baruwadi², Sukirman Rahim³**

^{1,2,3} Program Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo
Irfanplano92@gmail.com¹, Mahludinbaruwadi@ung.ac.id², sukirmanrahim@gmail.com³
(081343777824)

Abstract

The study aims at analysing the management strategy of slums areas. In addition, this study is carried out in all slums in Gorontalo City. The techniques and procedures employed in this study are survey, FGD (Focus Group Discussion), and interview. At the same time, the analysis method is done by applying a quantitative approach, where the analysis for scoring the aspects of slum levels referring to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing (PUPR) Number 14 of 2018, the measurement of priority aspects in handling slums using AHP (analytic hierarchy process) analysis, and management strategy applying SWOT analysis. Finding reveal that 1) the slum level in Gorontalo City is in the light slum category with the biggest problem is Drainage for 42% and the slightest problem is potable water for 23%, 2) the priority aspect in handling slum are potable water for 42,25%, 3) the management strategies of slum area are performed by enhancing collaboration between regional and central programs with the provision complete supporting documents to meet technical planning criteria that have good quality, improving the role of Housing and Settlement Working Group (POKJA PKP) in supporting program coordination, advocacy of Regional Working Unit and stakeholders in Gorontalo City, and providing strategic inputs proposing a planning budget for slum area management. In addition, the management strategy is carried out by preparing planning documents for the handling of slums that are integrated with other planning documents and increasing the role of social institutions in the community in supporting the handling of slums.

Keywords: *Slum, Settlement, Management, Characteristics, AHP, SWOT***PUBLISHED BY :**Engineering Faculty
Universitas Muslim Indonesia**Address :**Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 (Kampus II UMI)
Makassar, Sulawesi Selatan.**Email :**losari.arsitekturjurnal@umi.ac.id**Phone :**

+62 81342502866

Article history :

Received 10 Juni 2021

Received in revised form 10 Juni 2021

Accepted 11 Juni 2021

Available online 8 Agustus 2021

licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan kawasan permukiman kumuh. Penelitian ini dilakukan di semua Kumuh Kota Gorontalo. teknik dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, FGD dan wawancara. Metode analisis digunakan adalah kuantitatif dengan alat analisis untuk scoring nilai kekumuhan aspek yang mengacu pada Permen PUPR No 14 tahun 2018, pengukuran aspek prioritas penanganan dengan analisis AHP dan strategi pengelolaan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tingkat kekumuhan di Kota Gorontalo masuk kategori kumuh ringan dengan permasalahan terbesar pada Drainase 42% dan permasalahan terkecil adalah air minum 23%, 2) aspek prioritas penanganan adalah air minum 45,25%, 3) strategi pengelolaan kawasan kumuh dilakukan dengan peningkatan kolaborasi program daerah dan pusat dengan penyediaan kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria teknis perencanaan yang berkualitas, peningkatan Peran POKJA PKP dalam mendukung koordinasi program, advokasi SKPD dan stakeholder kota, dan memberikan input strategis dalam pengusulan anggaran perencanaan untuk kegiatan pengelolaan kawasan kumuh, penyusunan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, dan peningkatan peran lembaga sosial di masyarakat dalam mendukung penanganan kumuh

Kata Kunci : Kumuh, Permukiman, Pengelolaan, Karakteristik, AHP, SWOT

A. PENDAHULUAN

Penduduk dan permukiman merupakan dua hal yang saling berkaitan, pertambahan jumlah penduduk akan terjadi setiap waktunya dan ini akan mempengaruhi kebutuhan akan rumah sebagai tempat untuk bermukim dan tinggal. Tingginya tingkat kebutuhan akan rumah tinggal dengan keterbatasan lahan yang ada di perkotaan, juga menimbulkan semakin sempitnya ruang yang tersedia untuk permukiman yang memadai dan layak. Hal ini menimbulkan adanya permukiman kumuh (*slum*) atau juga dapat disebut sebagai permukiman liar (*squatter*) padat penduduk di suatu wilayah, yang mayoritas ditempati oleh masyarakat golongan menengah kebawah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan arah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengamanatkan meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Kebijakan ini memberikan dorongan kepada pemerintah kota untuk membuat perencanaan yang strategis dalam penanganan permukiman kumuh. Persoalan kekumuhan tidak hanya berbicara tentang hunian namun juga dampak terhadap lingkungan apabila tidak tertangani dengan baik. Kondisi kawasan kumuh yang mudah banjir, sanitasi yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, bahkan cenderung rawan terhadap kriminal. Kondisi ini memberikan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mendiami kawasan kumuh.

Permukiman kumuh di Kota Gorontalo berdasarkan No SK Walikota No 341/23/XII/2020 tahun 2020 seluas 206,7 Ha yang tersebar di 18 Kelurahan dan 60 Rumah Tangga (RT). Permukiman kumuh di Kota Gorontalo terletak pada daerah pesisir pantai, pesisir sungai, perbukitan, dan perkotaan. Wilayah dengan kawasan kumuh terluas berada di Kelurahan Talumolo (30,81 ha), disusul Kelurahan Lekobalo (18,81 ha), Kelurahan Dembe I (17,15 ha),

dan Kelurahan Heludulaa Utara (16,65 ha). Sejak tahun 2017-2020 pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Gorontalo, berbagai kegiatan dan program telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta, lembaga pemerhati lingkungan dan swadaya. Penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan cara pencegahan, dan peningkatan kualitas. Baik dengan pembangunan infrastruktur dasar kawasan maupun dengan skala kawasan.

Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil pengurangan kumuh tanggal 25 bulan februari tahun 2020, yang dilakukan oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Gorontalo luas kawasan kumuh yang berhasil ditangani sebesar 144,25 ha. Tetapi pemerintah Kota Gorontalo juga mengeluarkan penambahan luasan kumuh baru yang akan ditangani hingga tahun 2024 seluas 206,7 Ha. Persoalan dalam pengelolaan kawasan kumuh di Kota Gorontalo yang tertuang dalam dokumen perencanaan Masterplan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (MP RP2KPKP) menyebutkan bahwa persoalan kekumuhan antara lain: (1) Kondisi morfologi wilayah adalah kondisi bentang alam dimana kawasan kumuh berada pada kawasan rawan bencana, dataran rendah, cekungan dan lainnya, (2) Pembangunan infrastruktur belum sesuai standar teknis dan lemahnya pemeliharaan, (3) Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung berada pada daerah *slum* dan *squatter* (4) Perilaku hidup sehat dan bersih belum optimal dan tingkat pendidikan yang rendah, (5) Dokumen perencanaan belum memuat *roadmap* tentang penanganan permukiman kumuh, (6) Integrasi program, kegiatan dan anggaran belum terkolaborasi antar stakeholders, (7) Lemahnya Implementasi peraturan perundang-undangan terkait penanganan permukiman kumuh (8) Ditempati secara illegal atau status hukum tanah yang tidak jelas (bermasalah).

Penanganan permukiman kumuh di Kota Gorontalo sebaiknya mengetahui karakteristik kawasan kumuh dan persoalan dasar dari kawasan tersebut, sehingga dalam penanganan dapat dilakukan dengan secara holistik, melalui strategi pengelolaan yang tepat. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh kawasan kumuh Kota Gorontalo. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2021.

Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis strategi pengelolaan kawasan kumuh diketahui melalui metode analisis SWOT.

Jenis Data dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi lapangan, menggunakan informasi dan wawancara kepada narasumber. Jenis data primer yang dibutuhkan meliputi panjang jaringan jalan yang rusak, panjang jaringan drainase yang rusak, sumber air minum, kondisi pembuangan air limbah, lokasi pembuangan sampah, pendapat responden melalui yang

dilakukan melalui kuisioner dan wawancara dengan para pakar dan stakeholder, antara lain Bappeda, Dinas Perkim, NGO, akademisi serta tokoh masyarakat.

2) Data Sekunder

Jenis data dan sumber data sekunder yang dibutuhkan meliputi dokumen RTRW, dan dokumen RPJMD Kota Gorontalo diperoleh dari Kantor BAPPEDA, Buku Kota dan Kecamatan dalam angka di Kota Gorontalo diperoleh dari BPS, status tanah dan IMB diperoleh dari Dinas Cipta Karya dan PU Kota Gorontalo, SK Kumuh Walikota dan data kondisi bangunan diperoleh dari Dinas Perkim Kota Gorontalo, data baseline diperoleh dari kantor kelurahan, data jangkauan pelayanan kebakaran dari BPPD, data pelayanan dan penanganan persampahan diperoleh dari DLH dan publikasi terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi Lapangan

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi infrastruktur di lokasi kumuh dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa pedoman pengamatan. Dengan mengamati/pengukuran secara langsung kondisi infrastruktur. Dengan teknik observasi ini, peneliti dapat secara langsung mengetahui permasalahan di lapangan.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*indepth interview*) dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan atau pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki informasi yang memadai terkait permasalahan kawasan kumuh. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berpedoman pada pedoman wawancara.

3) Focus Group Discussion (FGD)

FGD atau diskusi kelompok terfokus dan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan diskusi beberapa orang. FGD untuk melakukan identifikasi permasalahan internal dan external juga strategi pengelolaan kawasan kumuh di Kota Gorontalo.

4) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Untuk analisis strategi pengelolaan kawasan kumuh ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat memaksimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 2019). Analisis SWOT memberikan output berupa matriks SWOT yang dapat menghasilkan empat sel atau tipe. Kemungkinan alternatif strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T. Pemilihan prioritas strategi penanganan akan dilakukan dengan pemberian bobot dan nilai sehingga akan mengeluarkan hirarki strategi sesuai kebutuhan dalam pengelolaan permukiman kumuh di Kota Gorontalo.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Faktor Internal

Faktor internal merupakan elemen-elemen kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki pemerintah/lembaga yang berperan aktif dalam pengelolaan kawasan kumuh di Kota Gorontalo.

1. Faktor Kekuatan (*strenghts*)

a. Kesesuaian misi pembangunan daerah 2019-2024

Perwujudan atas Visi kota dirumuskan orientasi pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 kedalam rumusan-rumusan misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi.

Dalam misi pembangunan kedua Kota Gorontalo yaitu : meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal di semua sektor publik. Salah satu Strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan pelayanan infrastruktur perkotaan sebagai tempat permukiman. Untuk itu arah salah satu kebijakan yang diambil adalah penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Arah kebijakan inilah yang dijadikan sebagai target dalam penanganan kumuh.

b. Adanya Kelembagaan POKJA PKP Kota Gorontalo

Dasar pembentukan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Berdasarkan Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pokja ini dibentuk sebagai wadah untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan koordinasi.

Pokja PKP Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan SK Walikota No.330/2/XI/2020 tentang pembentukan Pokja PKP. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor di dalam Pokja PKP terdiri dari berbagai unsur OPD. Melalui Pokja PKP inilah melakukan berbagai strategi yang terkait dengan pengelolaan kawasan kumuh.

c. Telah ada Perda Kumuh

Perda Kumuh No 19 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Perda kumuh sebagai dasar hukum penanganan permukiman berdasarkan tujuh aspek kumuh.

d. Telah memiliki SK kumuh

Surat Keputusan Walikota Gorontalo No 341/23/XII/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Surat ini dijadikan sebagai syarat teknis sehingga dapat melakukan kolaborasi dengan provinsi dalam penanganan permukiman kumuh.

e. Dokumen RP2KPKP sebagai pedoman perencanaan dan penanganan permukiman kumuh

Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki dokumen perencanaan MP RP2KPKP tahun 2018. Dokumen MP RP2KPKP adalah dokumen perencanaan yang terkait dengan rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun Pokja PKP Kota Gorontalo yang memuat umusan strategi, kebutuhan program dan investasi dalam rangka menuju permukiman yang bebas kumuh dan berkelanjutan.

- f. Adanya dokumen perencanaan di tingkat Kelurahan dalam penanganan kumuh
Disamping dokumen MP RP2KPKP ternyata di masyarakat terdapat dokumen perencanaan yang disebut dokumen Rencana Renataan Lingkungan Permukiman (RPLP), dokumen berisi tentang tentang profil permasalahan permukiman, kebutuhan invetasi kegiatan selama 5 (lima) Tahun dan kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh.
- g. Adanya lembaga swadaya masyarakat di kelurahan
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah lembaga masyarakat yang memiliki peran sebagai lembaga masyarakat yaitu menyalurkan program-program pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pendekatan partisipatif.

2. Faktor Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) masih terbatas
Pokja PKP yang dibentuk masih memiliki kapasitas terbatas dalam melakukan pengelolaan kawasan kumuh secara komprehensif. Setiap ASN masih fokus pada tupoksi masing-masing sesuai bidangnya pekerjaannya. Sehingga untuk melakukan penanganan kumuh masih bersifat simpatisan.
- b. Keterbatasan anggaran fiskal bidang PKP
Keterbatasan anggaran pemerintah Kota Gorontalo masih sangat terbatas dalam penanganan permukiman kumuh, Besarnya kebutuhan biaya untuk pembebasan lahan atau ganti rugi asset terhadap Warga Terkena Proyek (WTP) menjadi permasalahan yang sangat rumit dalam penanganan permukiman kumuh.
- c. Keterpaduan program lintas OPD dalam pembangunan PKP belum maksimal
Keterpaduan program dan kegiatan lintas OPD dikatakan belum maksimal dalam pembangunan bidang PKP disebabkan karena setiap OPD mempunyai target pencapaian masing-masing.
- d. Sistem pendataan dan pembangunan urusan PKP belum maksimal
Data yang terkait dengan persoalan bidang PKP belum dapat disatukan menjadi satu database sehingga dapat dijadikan sebagai target bersama dalam penanganan permukiman kumuh.
- e. Lemahnya pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Persoalan kumuh tak lepas dari persoalan pengaturan bangunan, pembangunan rumah yang tak memiliki izin menjadikan aturan terhadap tata ruang sering dilanggar oleh masyarakat. Ketaatan terhadap IMB juga harus diawasi sehingga persoalan pelanggaran terhadap garis sempadan dapat dicegah sebelum menimbulkan persoalan di kemudian hari.
- f. Belum tersedianya lahan untuk relokasi permukiman
Penyediaan lahan untuk relokasi kawasan kumuh belum tersedia, tingginya harga lahan dipertanian sehingga pemerintah tidak dapat menyediakan lahan untuk melakukan relokasi kawasan kumuh.
- g. Tingkat pengawasan dan pemeliharaan yang belum optimal
Banyaknya kerusakan infrastruktur dasar permukiman disebabkan kurangnya pemeliharaan dan pengawasan. Jalan yang rusak, MCK umum yang tidak terpelihara, pipa air yang bocor dan permasalahan lainnya dapat dijadikan indikasi bahwa infrastruktur yang dibangun tidak dapat bertahan lama. Hal perlu adanya pengawasan

yang ketat dan pemeliharaan yang rutin baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

- h. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih rendah

Pola hidup bersih dan sehat di lokasi kawasan kumuh masih sangat rendah. Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih dengan tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan seperti pembuangan sampah di saluran air/lahan terbuka, pemeliharaan ternak secara terbuka/lepas, pembuangan air limbah di halaman dan buang air besar di sungai atau dibungkus plastik lalu di buang disembarang tempat. Kebiasaan ini yang memperburuk kondisi lingkungan di kawasan permukiman kumuh.

Analisis Faktor Eksternal

Faktor eksternal terbagi dua yaitu peluang dan ancaman yang bersal dari luar. Faktor ini akan dilakukan analisis dalam penentuan strategi pengelolaan kawasan kumuh.

1. Faktor Peluang (*opportunities*)

- a. Adanya program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari kementerian PUPR

Program IBM ini menysasar pembangunan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (sanimas)/tempat pengelolaan sampah 3R (TPS3R), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kesemua program ini dapat memberikan stimulus kepada pemerintah Kota Gorontalo dalam penanganan permukiman kumuh.

- b. Masuk dalam target penanganan kumuh RPJM Nasional 2020-2024: Perumahan dan Permukiman

Kota Gorontalo termasuk dalam target penanganan 10.000 ha kawasan kumuh 2020-2024.

- c. Tujuan SDGs dalam mendukung pengentasan kawasan kumuh

Pemerintah telah melakukan integrasi indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024. Target tujuan global 11.1: yaitu pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

- d. Adanya pendanaan pelatihan-pelatihan dan kementerian PUPR untuk pengembangan SDM dalam penanganan permukiman kumuh.

Kebutuhan akan Sumberdaya Manusia (SDM) yang handal dalam penanganan kumuh sangat dibutuhkan. Untuk itu kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) melakukan berbagai bentuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh.

- e. Sumber dana dari CSR untuk pembiayaan pengelolaan kawasan kumuh

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan (PP No 47, Tahun 2012).

Pemerintah Kota Gorontalo dapat berkolaborasi dengan perusahaan apa saja untuk berkontribusi aktif dalam melakukan penanganan permukiman. Kontribusi ini dapat berupa pemberian dana pembangunan, pelatihan-pelatihan untuk penguatan kapasitas atau peningkatan ekonomi rumah tangga dan dapat juga joint program kegiatan sehingga tujuan bersama dapat terwujud.

f. Memiliki fungsi strategis nasional

Lokasi kawasan kumuh di Kota Gorontalo sebagaimana berada pada wilayah strategis nasional. Ini memberikan peluang bagi pemerintah kota untuk mendapatkan akses sumber dana dari APBN.

2. Faktor Ancaman (*Treats*)

a. Urbanisasi Penduduk dari Desa ke Kota

Urbanisasi salah satu sebab terjadinya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan dan ini akan memerikan berbagai permasalahan termasuk diantaranya adalah permukiman kumuh. Kondisi ini dipermarah bila yang masuk tidak memiliki keahlian dan bekerja disektor informal dengan penghasilan yang rendah, sehingga tidak mampu mendiami perumahan yang layak

b. Penurunan Pertumbuhan perekonomian Kota Gorontalo akibat Pandemi Covid 19

Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo cenderung stabil, Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) Tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di atas 7 % sejak tahun 2015 hingga 2019. Tetapi sejak tahun 2020 dikarenakan adanya wabah pandemi covid 19, sehingga pertumbuhan ekonomi gorontalo menurun mejadi 4,04%. Hampir semua sektor lapangan usaha mengalami penurunan terutama sektor pertanian dan komsumsi rumah tangga (BPS, 2020).

c. Bencana Alam seperti banjir, gempa dan tanah longsor

Kota Gorontalo termasuk dalam wilayah rawan bencana, dimana bencana yang sering melanda Kota Gorontalo adalah banjir, tanah longsor, gelombang pasang/tsunami dan gempa bumi. Sebagian wilayah kumuh berada pada kawasan rawan bencana seperti longsor dan banjir. Kondisi memerlukan penanganan yang lebih dibandingkan kawasan kumuh yang diluar wilayah rawan bencana.

Analisis SWOT

Setelah melakukan pembobotan dan rating pada faktor internal dan eksternal, kemudian dilakukan rumusan alternatif-alternati strategi dengan menggunakan matriks SWOT, yaitu strategi kekuatan untuk menangkap peluang (SO), strategi meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang (WO), strategi menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman (ST), dan Strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (WT). Matriks Strategi SWOT dalam pengelolaan kawasan kumuh di Kota Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis SWOT Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian misi pembangunan daerah 2019-2024 2. Adanya Kelembagaan POKJA PKP Kota Gorontalo 3. Telah ada Perda Kumuh 4. Telah memiliki SK kumuh 5. Dokumen RP2KPKP sebagai pedoman perencanaan dan penanganan permukiman kumuh 6. Adanya dokumen perencanaan di tingkat kelurahan dalam penanganan kumuh 7. Adanya lembaga swadaya masyarakat di kelurahan 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) masih terbatas 2. Keterbatasan anggaran fiskal bidang PKP 3. Keterpaduan program lintas OPD dalam pembangunan PKP belum maksimal 4. Sistem pendataan dan pembangunan urusan PKP belum maksimal 5. Lemahnya pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Belum tersedianya lahan untuk relokasi permukiman 7. Tingkat pengawasan dan pemeliharaan yang belum optimal 8. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih rendah
	<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari kementerian PUPR 2. Masuk dalam target penanganan kumuh RPJM Nasional 2020-2024: Perumahan dan Permukiman 3. Tujuan SDGs dalam mendukung pengentasan kawasan kumuh 4. Adanya pendanaan pelatihan-pelatihan dan kementerian PUPR untuk pengembangan SDM dalam penanganan permukiman kumuh 5. Sumber dana dari CSR untuk pembiayaan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kolaborasi program daerah dan pusat dengan penyediaan kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria teknis perencanaan yang berkualitas. 2. Peningkatan Peran POKJA PKP dalam mendukung koordinasi program, advokasi SKPD dan stakeholder kota, dan memberikan inout strategis dalam pengusulan anggaran perencanaan untuk kegiatan pengelolaan kawasan kumuh. 3. Penyusunan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya 4. Peningkatan peran lembaga

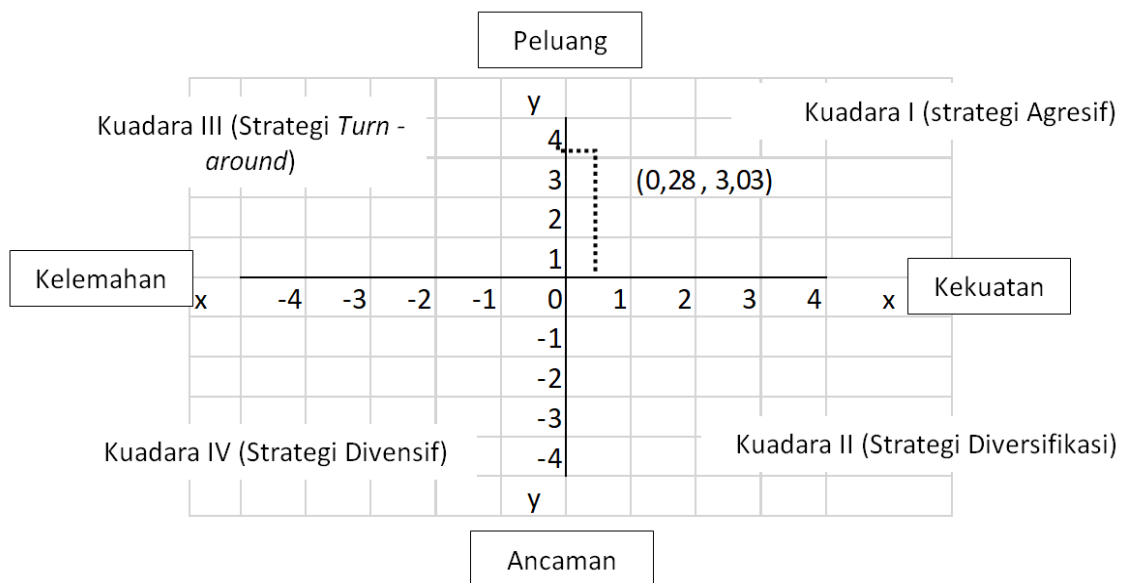
pengelolaan kawasan kumuh 6. Memiliki fungsi strategis nasional	sosial di masyarakat dalam mendukung penanganan kumuh	
ANCAMAN (T) 1. Urbanisasi Penduduk dari Desa ke Kota 2. Penurunan Pertumbuhan perekonomian Kota Gorontalo akibat Pandemi Covid 19 3. Bencana Alam seperti banjir, gempa dan tanah longsor	STRATEGI (ST) 1. Pelibatan lembaga sosial di kelurahan dalam alam peningkatan ekonomi masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kawasan kumuh yang rawan bencana 2. Penyiapan perencanaan skala lingkungan yang melibatkan kelompok-kelompok yang rentan dan MBR	STRATEGI (WT) 1. Pelarangan izin mendirikan bangunan pada wilayah rawan bencana 2. Melakukan kerjasama CSR dalam penyediaan lahan relokasi pada permukiman rawan bencana.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

PEMBAHASAN

Strategi pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo

Melalui perhitungan dan telah telah mendapatkan jumlah nilai dari Bobot dikali Rating, maka akan dilakukan penentuang posisi titik koordinat internal dan Eksternal yaitu:



Gambar 1. Diagram EFAS dan IFAS Analisis SWOT

Berdasarkan gambar 1, maka pemerintah Kota Gorontalo memiliki kekuatan untuk memperoleh peluang yang besar dalam melakukan pengelolaan kawasan kumuh. Kekuatan yang terbaik adalah pada kemampuan pengelolaan kebijakan dan kualitas perencanaan yang dapat menciptakan peluang pendanaan yang besar sehingga intervensi pusat terhadap penanganan kumuh di Kota Gorontalo menjadi prioritas.

Berikut adalah strategi SO yang dapat digunakan dalam pengelolaan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Gorontalo.

1. Peningkatan kolaborasi program daerah dan pusat dengan penyediaan kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria teknis perencanaan yang berkualitas.

Strategi ini bertujuan agar semua program baik bersifat pemberdayaan, perencanaan dan pembangunan yang terkait penanganan kawasan kumuh, pemerintah kota mendukung sepenuhnya dengan meningkatkan kerjasama program-program kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat (PAMSIMAS), program Sanitasi Masyarakat (SANIMAS), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program prioritas di RPJMN 2020-2024 kesemuanya dari kementerian PUPR. Untuk mendapatkan keberlanjutan program ini pemerintah Kota Gorontalo tetap melakukan Update data pemanfaat, review dan revisi dokumen-dokumen perencanaan sektoral terkait air minum, sanitasi, persampahan, perumahan dan permukiman kumuh, kebakaran, dan juga penyiapan sharing program dan dana APBD sebagai Readiness Criteria (RC). Syarat ini, tak lain tak bukan, adalah demi memastikan bahwa pemerintah siap menerima program dari pusat.

2. Peningkatan Peran POKJA PKP dalam mendukung koordinasi program, advokasi SKPD dan stakholder kota, dan memberikan input strategis dalam pengusulan anggaran perencanaan untuk kegiatan pengelolaan kawasan kumuh.

Pokja perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis. Peningkatan peran Pokja PKP dengan, melakukan sinergi, koordinasi, dan aksi sehingga dapat menghasilkan data PKP yang terbaru dan valid, dokumen perencanaan yang responsif dan operasional serta dapat melakukan pengukuran/monitoring capaian kinerja PKP. Hal ini akan memberikan dampak pembangunan kedepan semakin efisien dan efektif, sehingga dapat menurunkan luasan kawasan kumuh di Kota Gorontalo.

3. Penyusunan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya

Strategi ini untuk mendukung kualitas dokumen perencanaan yang semakin operasional. Pendekatan Fasilitatif dan Partisipatif digunakan dengan dasar pertimbangan bahwa proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah. Hasil penyusunan Dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota agar memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Gorontalo.

4. Peningkatan peran lembaga sosial di masyarakat dalam mendukung penanganan kumuh
Peningkat kapasitas individu dan swadaya masyarakat melalui proses partisipasi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Gorontalo akan mendorong proses perubahan yang dikehendaki, baik dalam hal sikap, perilaku maupun tanggungjawab masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Pelibatan peran lembaga sosial dalam kegiatan pengelolaan kawasan kumuh dapat diwujudkan dengan cara yaitu peningkatan secara sosial yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan dalam peningkatan ekonomi rumah tangga, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan yaitu dengan pelibatan mereka dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan skala lingkungan.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis SWOT, pemerintah Kota Gorontalo berada pada kuadran pertama, maka strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo yaitu: peningkatan kolaborasi program daerah dan pusat dengan penyediaan kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria teknis perencanaan yang berkualitas, peningkatan Peran POKJA PKP dalam mendukung koordinasi program, advokasi SKPD dan stakeholder kota, dan memberikan input strategis dalam pengusulan anggaran perencanaan untuk kegiatan pengelolaan kawasan kumuh, penyusunan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, dan peningkatan peran lembaga sosial di masyarakat dalam mendukung penanganan kumuh

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan memberikan beberapa saran agar pengelolaan permukiman kawasan kumuh dapat tercapai secara optimal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Gorontalo diharapkan dapat melakukan penanganan permasalahan kumuh secara komprehensif dan persuasif pada masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanganan kumuh.
2. Kepada masyarakat yang berada di kawasan kumuh agar dapat terlibat secara aktif dalam proses penanganan permasalahan kumuh, termasuk berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah
3. Kolaborasi dan keterpaduan program-program kegiatan antar pemerintahan Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo, serta swasta, harus terus ditingkatkan dalam percepatan penanganan kawasan kumuh.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, iwanJ. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: FE UI.
- Agustianto, S. 2002. *Analisis Model Konsep Penanganan Permukiman Kumuh*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Ahira, Anne. 2011. *Kesehatan Lingkungan Permukiman* (www.anneahira.com/kesehatan-lingkungan-permukiman.htm). diakses 2 Juni 2020.

- Asiana Rahmawati. 2018. *Aplikasi SWOT Di Kawasan Permukiman Kumuh (Kelurahan Biring Romang)*. IPLB. Makassar
- Aurachman, Rio 2019. *Proses Pengambilan Data Pada AHP (Analytical Hierarchy Process) Menggunakan Prinsip Closed Loop Control System*. JISI, 6(1).
- David, F.R. 2009. *Manajemen Strategi (konsep)*, Edisi 12. Salemba Empat: Jakarta
- Ervianto, W. I. 2019. *Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan Di Perkotaan*. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186.
- Fasri Bachmid, & Ariyanto. 2017. *Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate*. *Plano Madani*, 6(2), 166–176.
- Hasanuddin, Perdatawati Bani. 2014. *Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar
- Hunger, J. David dan Thomas L Wheelen. 2001. *Manajemen Strategis*. Andi: Yogyakarta.
- Jawas Dwijo Putro. 2011. *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya*. *Jurnal Teknik Sipil Untan*, Vol. 11 No 1, JUNI 2011
- Mirad, Tumada. 2012. *Analisis Strategi Pembangunan kabupaten Muna*. Jakarta : FE.UI
- Malau, W 2013. *Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan*. UNIMED. JUPIIS, 5(2).
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo. 2017. *Momerandum Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (MP RP2KPKP) tahun 2017-2019*. Perkim. Gorontalo
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum: Jakarta
- Rangkuti, Freddy. 2019. *Swot Balanced Scorecard*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Siagian, S.P. 2005. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara: Jakarta
- Surya, B, U. B., & Subdistrict, D. P. 2015. *Modernization in the Development of a Town and Community – Based Management Strategy of Slum Areas: A Case Study: Urban Slum Areas of Sangatta, East Kutai Regency*. *Indonesia Economia : Seria Management*, 18(2), 177–195.
- Suryani Tajuddin. 2017. *Management of Slum Areas in Somba Opu Subdistrict Gowa Regency*. Tesis : UNHAS Makassar
- Syam, Muhajir. 2017. *Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Pemukiman Di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar
- Saaty, T. L. 2008. *Decision making with the analytic hierarchy process*. *Int. J. Services Sciences*.
- UN-HABITAT. 2010. *The Rural Dimension of Sustainable Urban Development,– United Nation – Governing Council of The United Nation Human Settlement Programe*
- UU No.1. (2011). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Republik Indonesia.
- Wahyudi, Agustinus Sri, MBA. 1996. *Manajemen Strategik*. Binarupa Aksara: Jakarta
- Wimardana, A. S. 2016. *Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2).
- Yudohusodo. S. 1991. *Tumbuhnya Pemukim-pemukim Liar di Kawasan Perkotaan*. JIIS. Nomor 1.